

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT
ISLAM DENGAN PARTAI POLITIK ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

Rafi Maulana Ramadhan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT
ISLAM DENGAN PARTAI POLITIK ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Rafi Maulana Ramadhan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ISLAM DENGAN PARTAI POLITIK ISLAM

(Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)

Oleh

Rafi Maulana Ramadhan

Penelitian ini untuk mengungkapkan lebih banyak fakta konseptual hubungan-hubungan yang menguntungkan antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam dalam perspektif teori pertukaran sosial. Pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau bertukar objek yang mengandung nilai antar individu maupun antar kelompok. Pada pertukaran sosial terdapat unsur *cost-reward-profit*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti ingin melihat fenomena di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame. Kelurahan Korpri Jaya memiliki pola geografis dan pola sosiologis yang kental akan kegiatan keagamaan, tetapi pada pemilihan umum partai politik Islam mengalami kekalahan. Penelitian ini melakukan pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan Masyarakat Islam Kelurahan Korpri Jaya dan pengurus partai politik Islam PKS dan PPP dari tingkat Kota hingga Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekalahan partai politik Islam disebabkan pertukaran sosial yang dilakukan antara partai politik Islam dengan masyarakat Islam tidak berjalan maksimal. Partai politik Islam seperti PPP tidak berhasil membangun *trust* (kepercayaan) dan memberi nilai pada pertukaran sosial yang terjadi dengan masyarakat Islam.

Kata kunci: Partai Politik Islam, Pertukaran Sosial, Masyarakat Islam

ABSTRACT***SOCIAL EXCHANGE RELATIONS BETWEEN ISLAMIC SOCIETY AND
ISLAMIC POLITICAL PARTIES***

*(Case Study of Korpri Jaya Village, Sukarame Subdistrict, Bandar
Lampung City)*

By

Rafi Maulana Ramadhan

This research is to reveal more conceptual facts about the beneficial relationships between Islamic communities and Islamic political parties from the perspective of social exchange theory. Social exchange is a theory related to social actions that mutually give or exchange objects that contain value between individuals and between groups. In social exchange there are elements of cost-reward-profit. This research uses a qualitative research method with a case study approach. The case study approach was chosen because the researcher wanted to see the phenomenon in Korpri Jaya Village, Sukarame District. Korpri Jaya sub-district has a geographical pattern and sociological pattern that is strong in religious activities, but in the general election the Islamic political party suffered defeat. This research collected data by conducting interviews with the Korpri Jaya Subdistrict Islamic Community and administrators of the Islamic political parties PKS and PPP from the city to subdistrict level. The results of this research indicate that the defeat of Islamic political parties was due to the social exchanges carried out by Islamic political parties with Islamic communities not running optimally. Islamic political parties such as PPP have failed to build trust and add value to the social exchanges that occur with Islamic communities.

Keywords: Islamic Political Party, Social Exchange, Islamic Society.

Judul Skripsi : **RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ISLAM DENGAN PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rafi Maulana Ramadhan**

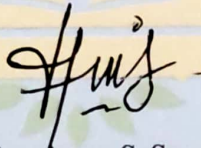
Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011036**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

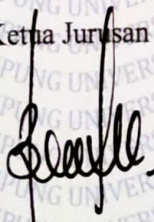
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Aziz Amriwan, S. Sos., M. Si.
NIP. 198507172019031014

2. **Ketia Jurusan Sosiologi**



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : **Aziz Amriwan, S. Sos., M. Si.**



Penguji Utama : **Junaidi, S. Pd., M. Sos.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 November 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 7 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Rafi Maulana Ramadhan
NPM. 1916011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rafi Maulana Ramadhan, lahir di Kota Bandar Lampung, 15 Desember 2000, merupakan putra sulung dari pasangan Bapak Dr. Koderi, M. Pd dan Ibu Heni Inayah, penulis tinggal di Jl. Pulau Legundi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dengan jenjang yakni:

1. Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di MTs N 2 Bandar Lampung pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi pada tahun 2020 dan menjabat sebagai Sekretaris Umum HMJ Sosiologi 2020/2021. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung. Saat ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Islam Dengan Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).

MOTTO

يُسْرًا أَلْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5-6)

Tidak penting seberapa anda maju, yang penting anda tidak berhenti.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas Berkah, Rahmat, dan Ridhonya sehingga Penulis Dapat Mempersembahkan Tulisan ini sebagai Tanda Terima Kasih dan Kasih Sayang Kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Dr. Koderi, S. Ag., M. Pd dan Ibu Heni Inayah terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang selalu tcurahkan, didikan, dukungan, pengorbanan serta doa-doanya yang selalu mengiringi langkah penulis dalam kehidupan dan prosesnya.

Adik-adikku

Aulya Afifah, Tsania Mahira Ad-Dine, dan M. Faiz Maulana Ramadhan.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan bimbingan serta ilmunya yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Teman-temanku

Teman sekolah dan Teman angkatan Sosiologi 2019.

Almamater Tercinta

Sosiologi, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Islam Dengan Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)" yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho, kasih sayang, serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan rezeki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini
2. Kedua orang tua yang amat saya cintai dan saya banggakan, Bapak Dr. Koderi, S. Ag., M. Pd dan Ibu Heni Inayah terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

6. Bapak Aziz Amriwan, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Junaidi, S. Pd., M. Sos. selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih banyak bapak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
9. Keluarga Leng (Blek, Kopong, Sule, Kambing, Dono, Leo, Pansos, Nopal Atheis, Gerin Reja Arap) dan Teman-temanku, baik di masa sekolah dan teman angkatan Sosiologi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan dalam prosesnya. Dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 7 November 2023

Penulis,

Rafi Maulana Ramadhan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pikir.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Masyarakat Islam	10
2.2 Tinjauan Partai Politik.....	12
2.2.1 Fungsi Partai Politik	13

2.2.2 Partai Politik Islam	14
2.3 Teori Pertukaran Sosial	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	18
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Informan Penelitian	23
3.4.1 Daftar Informan	24
3.5 Sumber dan Jenis Data	30
3.5.1 Data Primer.....	30
3.5.2 Data Sekunder	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.1 Wawancara Mendalam	31
3.7 Pengolahan dan Analisis Data	32
3.8 Keabsahan Data	33
IV. GAMBARAN UMUM	34
4.1 Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung	34
4.1.1 Sejarah Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung	34
4.1.2 Demografis Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar	
Lampung.....	36
4.1.3 Kondisi Sosial Keagamaan Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota	
Bandar Lampung	38
4.2 Partai Keadilan Sejahtera	43
4.2.1 Sejarah.....	43
4.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan	45

4.2.3 Struktur Organisasi	46
4.3 Partai Persatuan Pembangunan.....	47
4.3.1 Sejarah	47
4.3.2 Visi dan Misi	48
4.3.3 Struktur Organisasi	50
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Hasil Penelitian.....	51
5.1.1 <i>Cost</i>	51
5.1.2 <i>Reward</i>	70
5.1.3 <i>Profit</i>	76
5.2 Pembahasan	84
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2 Daftar Informan.....	29
Tabel 3 Daftar Pekerjaan Penduduk Kelurahan Korpri Jaya	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	9
Gambar 2 Struktur PKS Kota Bandar Lampung.....	46
Gambar 3 Stuktur PPP Kota Bandar Lampung.....	50

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengkaji tentang Islam dan politik berarti meluas tentang dua hal yang berbeda. Di satu sisi, Islam merupakan sebuah keyakinan dan agama yang berkembang cukup pesat sejak abad ketujuh Masehi atas perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga saat ini. Dengan berpegangan kepada sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah, Islam menjadi sebuah kekuatan besar di dunia. Sedangkan di sisi lain, politik adalah dimensi praktis dan menyejarah yang terkait dengan kekuasaan dan kepartaian terutama dalam lingkungan Negara. Dalam konteks ini Islam dan politik di pertemukan dalam satu ruang di mana pada kenyataannya Islam harus terlibat dalam aktivitas politik manusia untuk memperjuangkan kekuasaan dan kewilayahan.

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia. Sehubungan dengan itu maka kedudukan masyarakat Islam memiliki pengaruh yang besar dalam politik Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang cukup berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia.

Bagi negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, dan keadilan. Partai politik di negara demokrasi memiliki tujuan utama yakni memperoleh kekuasaan dengan memenangi pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan publik mereka setelah berkuasa. Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan - kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional. (Budiarjo, 2003).

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai, dalam artian memiliki lebih dari satu partai dengan berbagai macam ideologi salah satunya adalah partai berbasis Islam. Partai politik Islam dalam jurnal M. Nursalim Malay, Menurut Greg Fealy partai Islam dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu : *Formalist Islamic Parties*, partai-partai ini berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam perundangan-undangan dan kebijakan-kebijakan negara, misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PPP, PBB, dan PKS. Kedua yaitu *Pluralist Islamic parties*, partai-partai ini memperjuangkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks negara-negara Indonesia yang plural, misalnya kelompok partai ini di Indonesia, PKB dan PAN (M. Nursalim, 2017).

Dalam perkembangan saat ini, tujuan partai politik berkembang lebih luas yakni partai politik hadir untuk mewujudkan kemanusiaan dan di saat yang bersamaan meraih kontrol atas kekuasaan. Thomas Meyer (2012) menjelaskan penyatuan tujuan atau fungsi dari sebuah partai modern yang ideal dapat berupa mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengerahkannya pada kepentingan bersama, dan merancang dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum.

Para tokoh politik, elit masyarakat dan unsur yang lainnya berlomba untuk mendapat simpati masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan kontrak politik. Kesepakatan dua kelompok atau lebih dalam kontrak politik tersebut sangat beraneka ragam. Segala tuntutan yang bersifat regional skala prioritas bagi rakyat setempat harus termuat dalam isi kontrak tersebut, yang kemudian wajib direalisasikan oleh partai politik yang menang. Demikian pula kelompok masyarakat berkewajiban untuk menggalang dukungan sebanyak mungkin dalam rangka menyukseskan dukungannya itu. Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan partai politik dengan pemilih, dan rakyat (Biyanto, 2015).

Fenomena kontrak politik dapat juga dijelaskan dengan kerangka pikir Peter Blau (1964) mengenai teorinya pertukaran sosial (*social exchange theory*). Berdasarkan teori ini, bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. Jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Proses pertukaran sosial politik dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan sehingga menimbulkan aspek kepentingan yang sangat kental.

Hasil pertukaran sosial tampak disadari menghasilkan dua kelompok atau lebih yang sangat berkepentingan didasarkan atas memperoleh keuntungan dan kekuasaan. Sisi lain pertukaran sosial adalah meningkatkan integritas sosial, membangun kepercayaan (*trust*), mendorong keberanian dan mengembangkan nilai-nilai kolektif. Dalam kaitan ini Blau menyatakan “resiprositas dan pertukaran diperluas dan digabung dengan pertumbuhan saling percaya yang bersifat paralel” (Susilo, 2008).

Hasil pemilihan umum tahun 1977-1997, partai politik Islam selalu mengalami kekalahan dan pada pemilu tahun 2009 partai Islam menempati urutan keempat dengan jumlah suara yang diperoleh (7,89%) jauh dibawah partai Demokrat (20,81), Golkar (14,45), dan PDIP (14,01) suara (KPU,

2009). Pada tahun 2014 partai politik Islam PKS memperoleh 6,79% suara dan PPP 6,53% suara, sedangkan partai politik Nasionalis seperti PDI-P memperoleh 18,95% suara, Golkar memperoleh 14,75 suara, dan Gerindra, 11,81% suara (KPU, 2014). Kemudian pada tahun 2019 partai politik Islam PKS memperoleh 8,21% suara dan PPP memperoleh 4,52% suara, sedangkan partai politik Nasionalis seperti PDI-P memperoleh 19,33% suara, Gerindra memperoleh 12,57% suara, dan Golkar memperoleh 12,31% suara (KPU, 2019). Data hasil pemilu Legislatif tahun 2019 di Kelurahan Korpri Jaya, partai politik Islam PPP memperoleh total 31 suara. Jika dibandingkan dengan partai politik Nasionalis seperti PDI-P memperoleh total 649 suara, Golkar memperoleh 430 suara, dan Gerindra memperoleh 311 suara (KPU, 2019). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa partai politik Islam masih berada dibawah partai politik Nasionalis berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

Pola geografis masyarakat di kelurahan Korpri Jaya, secara umum yang terkait dengan instansi keagamaan, terdapat instansi pendidikan MTs N 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung, 5 masjid, 4 surau/mushola,. Keterlibatan masyarakat terhadap himpunan kewargaan yang bersifat keagamaan tersebar di kelurahan Korpri Jaya. Sedangkan pola sosiologisnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan adalah adanya pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari jumat yang diisi dengan ceramah dan kegiatan lainnya. Jika yang dijadikan objek adalah partai politik Islam dan masyarakat Islam di Kelurahan Korpri Jaya, maka diharapkan adanya pertukaran sosial yang terjadi antara masyarakat Islam dan partai politik Islam. Tetapi berdasarkan hasil pemilu yang telah terjadi, partai politik Islam mengalami kekalahan hasil perolehan suara pemilu di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

Atas dasar deskripsi diatas penulis akan mengkaji mengenai relasi pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam di kelurahan Korpri Jaya. Tentang bagaimana pertukaran sosial yang terjadi

antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam. Yang mana Pola geografis masyarakat di kelurahan Korpri Jaya, secara umum yang terkait dengan instansi keagamaan dan pola sosiologisnya yang aktif dalam kegiatan keagamaan namun partai islam di kelurahan korpri jaya dalam data pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu 2019, justru partai Islam mendapat suara yang rendah. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ISLAM DENGAN PARTAI POLITIK ISLAM** (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)“.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru tentang masyarakat dan partai politik. Penelitian tentang masyarakat dan partai politik yang dilakukan oleh irawati (2022) menunjukkan bahwa masyarakat adalah salah satu tokoh utama dalam demokrasi, sehingga masyarakat memiliki peran penting. Lalu Nofal Liata (2020), menyebutkan bahwa terdapat hubungan “simbiosis mutualisme” saling menguntungkan antara masyarakat dan partai politik. Pada penelitian tentang masyarakat dan partai politik lainnya oleh Dawud (2014) menghasilkan bahwa tingkat kepuasan dan preferensi pilihan masyarakat muslim terhadap partai berbasis Islam rendah (14%).

Kemudian Penelitian tentang masyarakat dan partai politik Islam yang dilakukan oleh Isnaini Nurul (2013), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bersikap positif terhadap partai politik Islam dengan presentase 48% dan masyarakat yang bersifat negative terhadap partai politik Islam dengan presentase 15%. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang masyarakat Islam dan partai politik Islam, dengan tujuan ingin mengungkapkan bagaimana pertukaran sosial yang terjadi antara masyarakat Islam dan partai politik Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian juga bernilai signifikan bagi upaya pembaharuan strategi politik dalam pemilihan umum dan pertimbangan bagi stake holder untuk lebih memahami mengenai persoalan-persoalan partai politik berasaskan partai politik Islam.
2. Hasil penelitian di harapkan dapat mengungkapkan fenomena pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam.

1.5 Kerangka Pikir

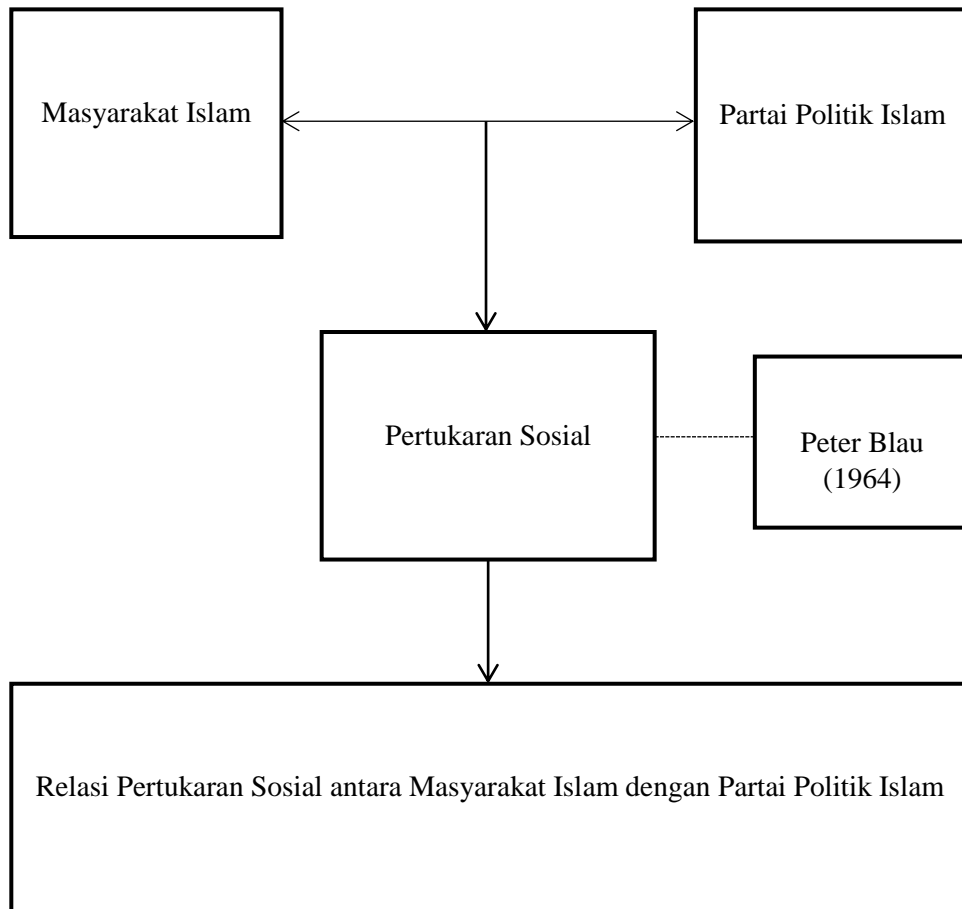
Masyarakat Islam dan partai politik dalam hal ini partai politik Islam memiliki hubungan mutualisme yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Partai politik Islam membutuhkan suara pendukung, begitu juga pada sisi masyarakat Islam membutuhkan partai politik Islam sebagai wadah aspirasi politik. Partai politik Islam memberikan beberapa hal bisa seperti materi dan non materi kepada masyarakat Islam sebagai basis suaranya, dan masyarakat Islam memberikan dukungannya dalam bentuk tertentu (materi

dan non materi kepada partai politik Islam. Keadaan seperti itulah yang kemudian menciptakan pertukaran sosial.

Pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu. Di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat pada umumnya, bahwa ada beberapa unsur masyarakat atau tokoh masyarakat yang melakukan pendekatan dengan tokoh yang bersaing dalam pemilu, atau justru sebaliknya sang peserta dalam persaingan pemilu tersebut melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau ke masyarakatnya.

Jadi pertukaran yang di lakukan disini adalah untuk mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materi atau non materi dengan mempertimbangkan *cost-reward-profit*. Berdasarkan teori ini, hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. Jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan (cost), dan keuntungan (profit). Di sinilah aspek kepentingan akan tampak sangat kental sehingga peneliti ini ingin mengungkapkan bagaimana relasi pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam.

Gambar 1 Kerangka Pikir



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat Islam

Masyarakat atau *society* adalah *a relatively independent or self-sufficient population characterized by internal organization, culture distinctiveness, and sexual recruitment* (David I Shill, *International Encyclopedia of the Social Science*, 1972: 587). Masyarakat atau *society* juga berarti *civilized community*, komunitas yang beradab, atau masyarakat madani, atau dalam bahasa *The community of Religion* disebut dengan istilah *median community* (Mircea, Eliade, 1978:308). Dengan demikian, dalam masyarakat terkandung makna komunitas, sistem organisasi, peradaban, dan silaturahmi. Rodney Stark bahkan sampai pada kesimpulan silaturahmi atau interaksi dalam terminology sosiologi adalah inti dari masyarakat. *Society in group of people who are united by social relationship* (Rodney Stark, 1985: 26).

Lantas, apa sesungguhnya yang dinamakan sebagai masyarakat atau umat Islam. Arti masyarakat Islam dengan mengadopsi definisi masyarakat dari Gillin & Gillin, adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam. Dalam kajian sosiologi, masyarakat Islam dibedakan dari segi identitas keagamaan masyarakat serta tradisi agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Agus Efendi, 1993:143). Tampaknya, pandangan Islam tentang masyarakat adalah positif optimistic. Islam melihat dunia ini sebagai aktualisasi aktivitas kemanusiaan. Kajian terhadap masyarakat Islam tampaknya telah menjadi kajian sosiologis yang menarik, banyak ahli F. Boisard misalnya, melihat masyarakat Islam sebagai masyarakat solider, karena meyakini adanya Tuhan dan kebenaran

yang tunggal. Seorang Muslim disebut oleh Boisard sebagai yang tidak terpisahkan dari masyarakat (Agus Efendi, 1993: 145)

Menurut Jalaludin Rakhmat (Islam di Indonesia: 42-43), setidaknya-tidaknya ada lima cara dalam mendefinisikan umat Islam, khususnya di Indonesia. Pertama, umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam. Dengan definisi ini, umat Islam di Indonesia adalah mayoritas yang amat heterogen, dengan varian yang amat rumit. Misalnya, ada yang disebut Islam-Jawa, dan, sebaliknya, ada juga yang dinamakan Jawa-Islam. Bagian terbesar di antara mereka, boleh jadi, hanya pemeluk Islam secara nominal dan tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dalam tipologi yang dibuat Geertz, mereka masuk dalam kategori yang kalau tidak *abangan* tentu *priyayi*.

Kedua, umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang sudah menjalankan ritus-ritus keagamaan atau upacara-upacara ibadat, seperti shalat, *shaum*, dan naik haji. Dengan definisi ini, jumlah umat Islam Indonesia menjadi terpangkas secara drastis. Tidak diketahui berapa persen jumlah persisnya. Ketiga, umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau lebih dari itu tentang ajaran-ajaran Islam. Keempat, umat Islam adalah himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam yang masuk dalam kategori ini, diantaranya, dapat ditemukan pada aktivis-aktivis mesjid, penggerak ormas Islam, atau anggota jamaah yang diatur.

Kelima, umat Islam adalah himpunan orang Islam yang terlibat secara ideologis dengan ajaran Islam. Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak semata sebagai sebuah system keyakinan, tetapi bahkan sebagai *weltanschauung* yang harus dijadikan dasar dalam memandang persoalan-persoalan dunia. Mereka umumnya dikenal sebagai 'kelompok fundamentalis'. Disamping itu, setidaknya masih ada dua definisi lagi yang sering dipakai dalam mendefinisikan umat Islam. Pertama, kelompok yang mempunyai definisi nominal, yang cenderung bersikap kompromistis. Bagi

mereka, hampir semua orang dapat disebut sebagai umat Islam dan harus diperlakukan sebagai umat Islam juga. Kelompok yang kedua, adalah kelompok yang mendefinisikan umat Islam secara *udeikigukal*, lebih cenderung bersikap non-kompromistis, ekstrim, dan revolusioner. Dalam batas tertentu, kelompok ini berani mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka.

2.2 Tinjauan Partai Politik

Ramlan Surbakti (1984), menyebutkan ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Maurice Duverger, (1985) mengatakan partai politik kelompok manusia mempunyai doktrin sama.

Miriam Budiardjo, (1992) mengatakan Partai politik ialah sekelompok yang terorganisasi, anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk

memperomosisikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai.

Carl Friendrich (1967:415) memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materil dan idiil kepada para anggotanya. R.H. Soltau (1961:199) menjelaskan partai politik yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Miriam budiharjo (2008), melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisapolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan

- kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.2 Partai Politik Islam

Menurut Th. Sumartana sebagaimana dikemukakan oleh Lili Romli (2006), ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berbasis agama. Pertama, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan keagamaan yang dipercayai. Kedua, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok. Ridho Hamdi (2013), partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang beerbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.

Dari sinilah kemudian muncul istilah partai politik Islam atau partai yang dilandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim tak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-

partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam. Pembahasan bagaimana format dan bentuk partai Islam tidak lepas dari pola hubungan Islam dan politik yang sekarang ini berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Partai politik Islam seperti PKS, PPP dan PBB secara tegas menamakan dirinya sebagai Partai politik Islam. Sementara PKB dan PAN secara jelas berlatarbelakang sebagai organisasi sosial keagamaan menamakan dirinya sebagai partai terbuka bagi penganut agama manapun (Imam Yahya, 2010).

Berdasarkan kajian ilmu politik, penggunaan istilah “Partai Islam” setidaknya memiliki dua konotasi. Pertama, ideologi organisasi yaitu merujuk pada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai lainnya. Kedua, basis sosio-kultural yaitu partai politik dilihat bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya.

Identitas dari sebuah partai bukan hanya bentuk organisasinya namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan dengan data dan fakta historis partai yang berasaskan Islam dibagi menjadi tiga kategori: pertama, partai Islam yang berasaskan Islam, kedua partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila, ketiga partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa Islam (Imam Yahya, 2010).

A. Prinsip-Prinsip Dasar Partai Islam

Prinsip adalah sesuatu hal yang dipegang teguh dan dijadikan pijakan oleh partai Islam yang mendasari segala aktivitas keorganisasian. Sebagai partai yang menggunakan label dan

atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum muslim, partai Islam mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) Berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran utama Islam yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena, partai Islam harus mendasarkan segala aktivitas kepartaian pada nilai-nilai universal kedua sumber ajaran Islam tersebut.
- 2) Musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses koordinasi tersebut, partai akan mendapat banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan tidak terkesan terburu-buru. Dengan proses musyawarah pula, kebesaran organisasi akan di dukung oleh banyak pihak yang memiliki kekuatan besar. Musyawarah mengindikasikan anti otoritarianisme dan anti kediktatorian. Karena itu, partai Islam harus bersifat kolektif-kolektif di mana setiap kebijakan harus diputuskan secara bersama-sama.
- 3) Berlaku adil. Setiap pemimpin dan anggota memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di masing masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak lain. Artinya, meskipun pada akhirnya sebuah keputusan tersebut akan merugikan pihak lain, tetapi keputusan tersebut sudah sesuai aturan dan berpihak pada mereka yang tertindas.

- 4) Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugrah dari yang maha kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan harus di atur dengan sedemikian rapi sehingga menciptakan perpaduan yang saling terkait satu sama lain dan bukan perpecahan yang bisa berdampak pada perang dan pertumpahan darah. Islam tidak mengajarkan perpecahan yang berdampak pada rusaknya iman dan moral umat manusia (Ridho Hamdi, 2013).

2.3 Teori Pertukaran Sosial

Teori *Social Exchange* dari Peter M. Blau. menyatakan bahwa; “pertukaran sosial tidak hanya di dasarkan pada keputusan individu saja, tetapi individu yang masuk membangun hubungan sosial dengan kelompok, sehingga pada individu turut melekat posisi, jenjang, norma kelompok, dan kewenangan-kewenangannya.” (Susilo, 2008). Peter M. Blau dalam *Social Exchange Theory*, yang diuraikan oleh Keren S. Cook [1987], dan di kutip ke dalam Rachmad Dwi Susilo (2008) menyatakannya bahwa “organisasi sosial mampu memberikan imbalan kepada manusia secara intrinsik.” Malcolm Waters, mengutip Blau dalam *Modern Sociological Theory*, ia menyatakan “banyak sekali kesenangan manusia yang berakar pada kehidupan sosial.” Partisipasi pada organisasi manusia (organisasi politik, partai politik) sudah menjadi keharusan memerlukan pengorbanan biaya (cost), dan kemudian distribusi pengorbanan dan imbalan.

Tujuan Peter Blau (1964) adalah “pengertian atas struktur social berdasarkan analisis atas proses-proses social yang mengatur hubungan-hubungan di antara individu dan kelompok. Maksud Blau adalah untuk melampaui perhatian Homans pada bentuk-bentuk elementer kehidupan social dan masuk kedalam suatu analisis mengenai struktur-struktur yang kompleks: “Maksud sosiologis yang utama dalam mempelajari proses-

proses interaksi tatap muka ialah meletakkan fondasi untuk memahami struktur-struktur social yang berkembang dan kekuatan-kekuatan social yang muncul yang mencirikan perkembangan mereka” (1964: 13).

Menurut Peter Blau, pertukaran sosial memenuhi watak-watak dengan fungsi utama (Susilo, 2008), yaitu: *Pertama*; Pembentukan pertalian pertemanan bagi pihak-pihak yang saling membuat persetujuan, baik pada strata (lapisan) yang sama maupun pada strata yang berbeda. *Kedua*; Meneguhkan Subkoordinasi atau dominasi, terutama terjadi jika interaksi dibangun dalam strata yang tidak sama. Dalam masyarakat yang paling sederhana, pertukaran sosial terjadi dalam bentuk *gift* (pemberian) dan *services*. *Gift* yang diterima tidaklah secara sukarela, namun di berikan di bawah *obligation* (kewajiban). Berdasarkan teori ini, bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. Maka dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui metode dan hasil penelitian yang akan dilakukan melalui tolak ukur penelitian terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian serta melihat berbagai konsepsi kasus serupa pada penelitian yang akan dijalani. Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irawati (2022)	Prefensi Masyarakat	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Negara

		Terhadap Partai Politik Islam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi	demokrasi memiliki keunggulan tersendiri, karena setiap dalam pengambilan keputusan mencakup aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah tokoh utama dalam sebuah Negara demokratis yang memiliki peran penting, dengan partisipasi masyarakat dalam maka menunjukkan adanya sukarela antara individu dengan esensial dan harus dihargai dengan mahal. Masyarakat Taman Rajo bahwa mereka tidak berpegang teguh pada partai yang berasas Islam sebab bagi mereka partai islam dengan partai nasional sama saja masih ada kader terjerat korupsi dalam menentukan pilihan mereka yang terpenting melihat dari latar belakang, rekam jejak dan ikatan kekerabatan, dan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor pemilihan rasional, faktor pendekatan sosiologi, faktor kurangnya sosialisasi dan faktor figur caleg
2.	Dawud (2014)	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam Studi Kasus di Kecamatan Kebumen pada pemilihan umum 2014	Skripsi ini berisi tingkat kepuasan dan preferensi pilihan masyarakat muslim terhadap partai berasas Islam rendah (14%) dan belum mampu mengalahkan keunggulan dari kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik berbasis masa Islam (23%) dan dari luar keduanya (41%) yang di sebabkan karena partai politik Islam belum mampu mewakili aspirasi masyarakat.
3.	Apris Ara Tilome, Andi Dody M. Putra Agustang,	Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala	Penelitian membuktikan Pertama, relasi pertukaran sosial elit politik merupakan situasi strategis yang saling bergantung, saling membutuhkan, dan sama-sama saling menguntungkan sekaligus sebagai suatu upaya

	Andi Agustang (2021)	Daerah Di Provinsi Gorontalo	konsolidasi kekuatan untuk mencapai keterpilihan/kemenangan dalam momentum pemilihan umum kepala daerah. Kedua, pola pertukaran sosial didasarkan pada sejumlah potensi kepemilikan sumberdaya elit baik figuritas, finansial, maupun kekuatan sosial yang menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menentukan dan memberikan restu/rekomendasi partai kepada pasangan calon kepala daerah. Ketiga, strategi pertukaran sosial adalah bagaimana elit politik memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Keempat, implikasi sosiologis adalah bagaimana interaksi sosial politik itu berlangsung dalam kehidupan masyarakat pasca pemilihan calon kepala daerah.
4.	Resti Juliani (2021)	Persepsi Masyarakat Plaju Palembang Terhadap Partai Politik Islam	Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 2 faktor yang mensugestiv persepsi yaitu faktor fungsional, yang faktor struktural. Yang mana faktor fungsional bisa ditentukan sang kepribadian, pengalaman masa kemudian, yang hal lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural ditentukan sang luar individu, model budaya, yang lingkungan sekitar.
5.	Isnaini Nurul (2013)	Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam, Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan	Penelitian ini Skripsi ini berisi mengenai sikap masyarakat di kelurahan Korpri Jaya terhadap partai Islam. Tentang sikap masyarakat mendukung atau memihak (favoriable) pada

		Sukarame, Kota Bandar Lampung	partai Islam. Yang mana pola geografis masyarakat di Kelurahan Kopri Jaya, secara umum yang terkait dengan instansi keagamaan dan pola sosiologisnya yang aktif dalam kegiatan keagamaan di kelurahan kopri jaya dalam data pemilihan umum legislatif tahun 2014.
--	--	-------------------------------	---

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang tertera pada table di atas, ditemukan beberapa persamaan keresahan awal yang turut dirasakan oleh penulis yaitu keresahan akan adanya minimnya partisipasi masyarakat terhadap partai politik Islam yang dibuktikan pada penelitian-penelitian diatas. Namun, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini ialah belum pernah ditemukannya sebuah penelitian yang mengkaji tentang pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam. Perspektif inilah kemudian yang membedakan bagaimana pertukaran sosial yang terjadi antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam khususnya di Kelurahan Korpri Jaya, Sukarame Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dan untuk dapat mengerti gejala sentral tersebut seorang peneliti harus mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum (Creswell : 2008). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini membutuhkan kajian yang mendalam mengenai fenomena pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam di Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada pemilu memiliki suara yang rendah terhadap partai politik Islam, sedangkan Pola geografis masyarakat di kelurahan Korpri Jaya, secara umum yang terkait dengan instansi keagamaan, terdapat instansi pendidikan. Keterlibatan masyarakat terhadap himpunan kewargaan yang bersifat keagamaan tersebar

disetiap kelurahan. Sedangkan pola sosiologisnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan adalah adanya pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat yang diisi dengan ceramah dan kegiatan lainnya.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek partai politik PKS dan PPP dengan alasan partai politik tersebut merupakan partai politik berasakan Islam yang dicetuskan pada AD/ART partai politik tersebut. Peneliti berupaya mengungkapkan lebih banyak fakta-fakta yang berhubungan antara basis konstituen partai PKS dan PPP dengan partai politik Islam PKS dan PPP. sehingga fokus penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan antara masyarakat Islam dan partai politik Islam guna membangun kesadaran politik masyarakat dan partai politik guna menunjang pembangunan, baik melalui pertukaran materi maupun non materi, sehingga kegiatan politik benar-benar menjadi bermanfaat untuk semua kalangan.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik mengambil sampel/informan dengan tidak berdasarkan random, daerah, ataupun strata. Melainkan berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian, informan ditentukan guna memudahkan peneliti untuk mencapai informasi yang ingin diraih.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 15 informan. Informan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi 2 bagian, yaitu informan dari partai politik Islam dan informan dari masyarakat Islam kelurahan

Korpri Jaya Kota Bandar Lampung. Pembagian klasifikasi tersebut sebagai bentuk peneliti mencari informasi terhadap 2 objek yakni, partai politik Islam dan masyarakat Islam.

3.4.1 Daftar Informan

Adapun profil informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Informan 1
Informan 1 adalah bapak Arif Rahman selaku Wakil Sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung. Informan lahir di Bandar Lampung, 15 Juni 1980. Informan saat ini tinggal di Jln. Imam Bonjol Kota Bandar Lampung.
- Informan 2
Informan 2 adalah bapak Firman Mulia selaku Ketua DPC PKS Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Informan lahir di Bandar Lampung, 24 Oktober 1986. Informan saat ini tinggal di alamat Jln. Pulau Singkep Gg. Pala 1 Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Informan 3
Informan 3 adalah Bapak Agus Hermansyah selaku Ketua DPRA PKS Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung. Informan lahir di Bandar Lampung, 09-Agustus-1985. Informan saat ini tinggal di alamat Jln. Senopati Gg. Yudistir Korpri Jaya Kota Bandar Lampung.
- Informan 4
Informan 4 adalah Bapak Albert Alam selaku Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung. Informan lahir di Bandar Lampung, 07 April 1964. Informan saat ini tinggal di alamat Jln. Pulau Antasari Kota Bandar Lampung. Informan merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2004-2014 dan 2014-2017 dan menjabat sebagai Ketua DPC PPP Bandar Lampung periode 2021-2026.

- Informan 5
Informan 5 adalah Bapak H. Thohir selaku Ketua DPAC PPP Kecamatan Sukarame. Informan lahir di Pontang, 12 Maret 1964. Informan saat ini bertempat tinggal di alamat Jln. Hendro Suratmin Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Informan 6
Informan 6 adalah Nana Suhana yang lahir di Bandung, 16 september 1971. Informan bertempat tinggal di Jl. Senopati kelurahan Korpri Jaya. Informan merupakan seorang wiraswasta. Informan memiliki pengalaman pemilu yang setiap pemilihan berlangsung selalu mengikuti. Informan pernah menjadi pengurus partai sebagai ranting partai Demokrat Kelurahan Sukarame, informan sudah memiliki pengalaman politik selama 20 tahun. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan keluarga, pekerjaan, tetangga dan lingkungan masyarakat.
- Informan 7
Informan 7 adalah Kurniawan Jaya Saputra yang lahir di Lampung Barat, 12 agustus 1973. Informan bertempat tinggal di Jl. Pembangunan, Gg. Pembangunan No. 65 kelurahan Korpri Jaya. Informan merupakan seorang buruh. Informan memiliki pengalaman politik dari tahun 1994-1998 sebagai pengurus Muhammadiyah pada tahun 1994-1998 dan pernah menjadi sekretaris kecamatan di Teluk Betung Selatan. Kemudian informan sudah mengikuti partai PK dari tahun 1998, dari situlah informan mengikuti pelatihan-pelatihan politik, mengikuti kajian serta membaca buku. Informan mendapatkan pendidikan politik dari lingkungan keluarga, dibesarkan oleh keluarga yang Islami dan merupakan kader Muhammadiyah.
- Informan 8
Informan 8 adalah Sopiya yang lahir di Lampung Barat, 15 november 1973. Informan bertempat tinggal di Jl. Pembangunan, Gg. Pembangunan No. 65 kelurahan Korpri Jaya. Informan adalah

seorang ibu rumah tangga. Informan memiliki pengalaman politik dari tahun 1994-1998. Informan mendapatkan pendidikan politik dari latar belakang keluarga. Informan pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan aktif dari masa remaja. Masuk kedalam ikatan remaja muhammadiyah, kemudian pemuda muhammadiyah. Pada zaman orda baru yaitu risma kemudian berubah lagi menjadi badan koordinasi risma, lalu berubah lagi menjadi BKPRMI. Informan pernah menjadi kader partai Keadilan pada tahun 1998. Informan sering mengikuti pelatihan-pelatihan saksi pemilu dan kajian-kajian lainnya.

- Informan 9

Informan 9 adalah Muhammad Yahya Ayyas yang lahir di Teluk Betung, 4 oktober 2000. Informan merupakan seorang mahasiswa. Informan bertempat tinggal di Jl. Pembangunan, Gg. Pembangunan No. 65 kelurahan Korpri Jaya. Informan mendapatkan pendidikan politik dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Informan mendapatkan pendidikan politik dari keikutsertaan dalam pemilihan ketua RT, kemudian mengikuti webinar KPU dan Bawaslu. Informan mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu KAMMI.

- Informan 10

Informan 10 adalah Agus Fitriyono yang lahir di Bandar Lampung, 1 agustus 1983. Informan bertempat tinggal di Jl. Senopati Gg. Sadewo kelurahan Kopri Jaya. Informan adalah seorang wiraswasta. Informan memiliki pengalaman politik yang mulai aktif pada era Jokowi-Prabowo pada tahun 2016 sampai terakhir pemilu 2019. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, tetangga dan juga masyarakat. Informan mendapatkan pendidikan politik dari tempat tinggal dan masyarakat sekitar.

- Informan 11

Informan 11 adalah Effendi yang lahir di Bandar Lampung, 10 desember 1973. Informan bertempat tinggal di Jl. Senopati Kelurahan Korpri Jaya. Informan adalah seorang buruh. Informan memiliki pengalaman politik sejak usia 17 tahun dan tidak pernah absen dalam mengikuti pemilu. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, dan tetangga. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan masyarakat, karena dari awal informan tinggal di Serang dan berada di lingkungan basis PPP. Dulu ketika di Serang informan mendapatkan pendidikan politik dari lingkungan keluarga yang menjadi basis PPP. Namun, sejak di Lampung informan mendapatkan pendidikan politik karena menjadi pengurus partai politik PPP. Serta informan tergabung kedalam Muhammadiyah.

- Informan 12

Informan 12 adalah Aang Romli. Informan lahir di Sukarame, 18 april 1965. Informan bertempat tinggal di Jl. Senopati kelurahan Korpri Jaya. Informan berprofesi sebagai buruh. Informan memiliki pengalaman pemilu sejak tahun 1997 dan pernah tidak mengikuti pemilu satu kali karena tidak ada yang menjadi referensi informan. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, tetangga. Informan pernah ikut aktif dalam partai politik sebagai ranting PPP tapi sudah beberapa tahun ini informan sudah tidak ikut aktif pada kegiatan partai politik.

- Informan 13

Informan 13 adalah Mulyadi. Informan lahir di Bandar Lampung, 25 mei 1965. Informan bertempat tinggal di Jl. Pulau Sangea kelurahan Korpri Jaya. Informan bekerja sebagai buruh. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, tetangga dan juga mendapatkan pendidikan politik ketika informan mulai menjadi simpatisan PPP. Sejak 1995 menjadi ketua RT, dan saat setelah itu sempat menjadi pengurus partai.

Didapatkan dari lingkungan masyarakat dari perkumpulan atau musyawarah. Informan memiliki pengalaman mengikuti pemilu dengan telah mengikuti pemilu sejak 1997 sampai sekarang tidak pernah absen. Informan juga memiliki pengalaman di dunia politik sejak bergabung menjadi simpatisan PPP tahun 2004-2019. Informan juga sejak tahun 2015-2019 pernah menjadi pengurus partai, kemudian menjadi ketua PAC namun mengundurkan diri karena alasan pribadi. Sejak saat itu juga informan sudah tidak aktif di kepartaian.

- Informan 14

Informan 14 adalah Rohadi. Informan lahir di Sukarame, 14 agustus 1970. Informan bertempat tinggal di Jl. Pulau Pisang kelurahan Korpri Jaya. Informan merupakan seorang wiraswasta. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan pekerjaan, keluarga, tetangga dan mendapatkan pendidikan politik berdasarkan latar belakang keluarga. Pada waktu itu keluarga informan merupakan simpatisan PPP. Karena hal tersebut pula informan mengenal pendidikan politik. Informan memiliki pengalaman politik sejak mengikuti pemilu tahun 1987, pada saat sudah memenuhi syarat pemilih pemilu.

- Informan 15

Informan 15 adalah Muslimin. Informan lahir di Sukarame, 19 januari 1967. Informan bertempat tinggal di Jl. Pulau Pisang kelurahan Korpri Jaya. Informan merupakan seorang wiraswasta. Informan mengikuti pemilu pertama kali pada pemilu 1984 yang pada waktu itu masih 3 kontestan pemilu partai politik, sampai sekarang tidak pernah absen dalam mengikuti pemilu. Informan mendapatkan pendidikan politik melalui lingkungan masyarakat, melalui obrolan-obrolan dengan tetangga atau teman, dan juga mendapatkan dari berita menonton televisi berita politik. Karena keluarga informan ada yang menjadi pengurus partai beberapa tahun lalu, sehingga ada campur lingkungan keluarga juga

mendapatkan pendidikan politik. Kalau masuk kepengurusan partai informan tidak pernah mengikuti kepartaian hanya sebatas simpatisan saja.

Tabel 2 Daftar Informan

NO	NAMA	USIA	JABATAN/PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Arif Rahman	50	Sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung	16 Maret 2023
2	Firman Mulia	37	Ketua DPC PKS Kota Bandar Lampung	28 Maret 2023
3	Agus Hermansyah	38	Ketua DPRA PKS Kelurahan Korpri Jaya	09 Mei 2023
4	Albert Alam	59	Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung	10 Maret 2023
5	H. Thohir	59	Ketua PAC PPP Sukarame	12 Mei 2023
6	Nana Suhana	52	Wiraswasta	25 Juli 2023
7	Kurniawan Jaya	50	Buruh	26 Juli 2023
8	Sopiyah	50	Ibu Rumah Tangga	26 Juli 2023
9	M. Yahya Ayyas	23	Mahasiswa	26 Juli 2023
10	Agus Fitriyono	40	Wiraswasta	26 Juli 2023
11	Effendi	50	Buruh	21 Juli 2023
12	Aang Romli	58	Buruh	21 Juli 2023
13	Mulyadi	58	Buruh	25 Juli 2023
14	Rohadi	53	Wiraswasta	25 Juli 2023
15	Muslimin	56	Wiraswasta	25 Juli 2023

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 informan pada penelitian ini. 15 informan tersebut terdiri dari 3 pengurus partai PKS Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, dan

Kelurahan Korpri Jaya. 2 pengurus partai PPP Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Sukarame. 10 masyarakat Kelurahan Korpri Jaya.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Sumber data terbagi menjadi dua diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Berikut penjelasan sumber datanya:

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti (Salsabila, 2022). Dalam penelitian ini, data primer sebagai basis utama dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan informan yang memiliki pemahaman terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang diambil berupa informasi dan keterangan yang berkenaan langsung dengan pokok permasalahan melalui masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya untuk mendapat data yang berkenaan dengan peran. Seperti wawancara dengan elit politik dan masyarakat yang kiranya berhubungan langsung dengan penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintahan (Salsabila, 2022). Dalam penelitian

ini, data sekunder sebagai data pendukung yang dimaksud seperti dokumentasi serta data dari pihak partai politik, masyarakat, dan instansi terkait yaitu KPU Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2007). Pada penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam. Menurut (Moleong, 2007) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Peneliti memilih wawancara mendalam dikarenakan pada penelitian ini dibutuhkan kedalaman informasi mengenai informan untuk dapat memenuhi pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian secara mendalam juga dipilih karena dapat memperkaya data peneliti dalam mendapatkan informasi, wawancara secara mendalam dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti lalu, kembali bertanya ketika dalam jawaban narasumber terdapat ulasan-ulasan yang perlu dibahas sehingga data yang dimiliki bervariasi dan valid.

3.7 Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai informasi yang dibutuhkan dirasa sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga komponen analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini ialah melalui hasil-hasil wawancara serta dokumentasi yang didapatkan dari lokasi dan juga jawaban informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa memilah serta meringkas data. Dalam hal ini setelah peneliti melaksanakan pengumpulan data kemudian menggolongkan Kembali ke tiap-tiap permasalahan lalu setelahnya bisa ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan dari tiap-tiap informasi yang tersusun yang kemudian diringkas lalu disimpulkan. Pada penelitian ini penyajian disajikan dalam bentuk teks deskriptif lalu kemudian kesimpulan yang dihasilkan akan memberi penjelasan atas permasalahan-permasalahan terkait.

4. Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

Setelah melakukan pengumpulan, reduksi, serta penyajian data, tahap terakhir dalam pengolahan dan analisis data ialah tahap verifikasi. Tahap verifikasi ialah penarikan kesimpulan untuk kemudian kesimpulan tersebut diuji validitasnya.

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan guna menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan data yang diperoleh melalui suatu pengujian. Menurut Creswell (2013) sumber data diperoleh dengan menguji bukti-bukti dari sumber dan menggunakan justifikasi yang koheren sehingga terbangunlah sebuah tema. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai tahap pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda, sehingga hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Triangulasi data dalam penelitian ini antara lain:

1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.
3. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung

Semula lokasi kelurahan ini bernama Kelurahan Harapan Jaya berasal dari bagian wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang luasnya 1.475 Ha, terdiri dari 7 lingkungan yaitu Lingkungan I, II, III, IV, V, IV dan VII. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No, 4 Tahun 2001 tentang Penghapusan, Pembentukan, dan Penggabungan Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Bandar Lampung maka Kelurahan Sukarame yang seluas 1.475 Ha dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Lingkungan I, II, dan sebagian dari Lingkungan III tetap menjadi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame.
2. Lingkungan IV, V, dan sebagian dari Lingkungan III menjadi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame.
3. Lingkungan VI, VIII, dan sebagian dari Lingkungan V menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame dengan luas wilayahnya 491 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 231/02.1/HK/2022 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Penetapan Jumlah Lingkungan Kelurahan dalam wilayah Kota Bandar Lampung, Kelurahan Harapan Jaya yang luasnya 491 Ha ditetapkan menjadi 2 lingkungan yaitu Lingkungan I terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT) dan Lingkungan II terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT). Kode nomor

Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame adalah No. 18.71.02.04. atas dasar keputusan Walikota Bandar Lampung tersebut maka resmilah Lingkungan VI, VII dan, sebagian dari Lingkungan V Kelurahan Sukarame I tadi menjadi Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012, Kelurahan Harapan Jaya yang terdiri dari 2 Lingkungan = 29 Rukun Tetangga (RT) dipecah lagi menjadi 2 kelurahan, yaitu :

1. Lingkungan I = 10 Rukun Tetangga (RT) menjadi Kelurahan Korpri Jaya.
2. Lingkungan II = 19 Rukun Tetangga (RT) menjadi Kelurahan Korpri Raya.

Kelurahan Korpri Jaya dikembangkan menjadi 2 lingkungan, yaitu :

1. Lingkungan I terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT)
2. Lingkungan II terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT)

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 499/2012 tanggal 1 Juni 2012 secara administrasi masing-masing nama kelurahan berjalan sejak bulan September 2012. Adapun yang pernah menjadi Lurah di lokasi Kelurahan ini sebagai berikut :

1. Partha Isamoe dari Januari 2002 s/d 3 Mei 2003
2. M. Helmi, SH. Dari 3 Mei s/d 29 Agustus 2005
3. Yusuf Musa, S.Sos. dari 29 Agustus 2005 s/d 28 Juli 2006
4. Asnari, SE. dari 28 Juli 2006 s/d 3 Maret 2008
5. H. Supangat dari 3 Maret 2008 s/d 21 Januari 2009
6. Danial Kenedi, S.IP., MH. Dari 21 Januari 2009 s/d 27 Juli 2009
7. Adi Surya, BA. Dari 27 Juli 2009 s/d 28 Februari 2010
8. Sidarman, S.IP. dari 28 Februari 2010 s/d Agustus 2017
9. M. Joni Adi Saputra dari Februari 2019 s/d sekarang

Kelurahan Korpri Jaya secara teritorial administratif langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rajabasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kelurahan Korpri Jaya secara geografis terletak di daerah dataran. Secara tipologi wilayah Kelurahan Korpri Jaya merupakan daerah persawahan dengan luas wilayah sebesar 241 Ha. Kelurahan Korpri Jaya memiliki batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kampung Way Huwi, Lampung Selatan
- b. Sebelah Barat : Kampung Way Dadi, Korpri Raya
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Sukarame, Way Dadi
- d. Sebelah Timur : Kampung Sabah Balau, Lampung Selatan

4.1.2 Demografis Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung

Kelurahan Korpri jaya memiliki jumlah masyarakat dengan total 4.328 atau 1.164 KK, jumlah tersebut dengan masing jumlah laki-laki 2.261 orang dan jumlah perempuan 2.067 orang. Hal tersebut menunjukkan masyarakat Kelurahan Korpri Jaya didominasi oleh laki-laki. Kelurahan Korpri Jaya memiliki kelompok umur yang didominasi oleh kelompok umur 46 tahun keatas dengan jumlah 1.411, diikuti kelompok umur 31-45 tahun dengan jumlah 921 orang. Kelompok umur 17-30 tahun menjadi urutan ketiga yang mendominasi masyarakat Kelurahan Korpri Jaya dengan jumlah 711 orang. (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Korpri Jaya masih didominasi masyarakat dengan usia produktif, usia juga mempengaruhi partisipasi politik. Secara tidak langsung usia mempengaruhi tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon anggota legislatif. Kondisi umur pemilih berpengaruh terhadap rasa ingin tahu

siapa caleg yang bakal dipilih, dari partai mana, bagaimana *track record*-nya dan apakah pernah terlibat kasus. Umur pemilih juga mempengaruhi bagaimana partisipan menilai serta merespon dan bersikap terhadap partai politik (Muhammad dkk. 2018:113).

Kelurahan Korpri Jaya terdapat masyarakat berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi, dan ada yang hanya berpendidikan taman SMP. Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya didominasi oleh lulusan SMA/Sederajat dengan jumlah 1.984 orang. Kelurahan Korpri Jaya memiliki masyarakat dengan lulusan S-1, S-2, dan S-3 dengan masing-masing jumlah 439 orang, 74 orang, dan 34 orang, serta 157 orang lulusan pondok pesantren (Kelurahan Korpri Jaya, 2022). Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Korpri Jaya dalam bidang pendidikan masih tergolong kurang maju. Pendidikan tidak secara langsung membuat pelaku politik ikut berpartisipasi. Pendidikan hanya memberikan dasar-dasar kepada setiap calon pelaku politik. Apabila dasar-dasar ini baik dan kuat, maka besar kemungkinan akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik.

Adapun kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Kelurahan Korpri Jaya di dominasi oleh petani. Untuk lebih jelas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Korpri Jaya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3 Daftar Pekerjaan Penduduk Kelurahan Korpri Jaya

Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	433 Orang
TNI/Polri	25 Orang
Wiraswasta/Pedagang	261 Orang
Petani	536 Orang
Buruh Tani	50 Orang
Pensiunan	59 Orang
Peternak	44 Orang
Dosen	5 Orang
Pengrajin	74 Orang
Karyawan Swasta	280 Orang
Karyawan Perusahaa Pemerintah	48 Orang

Jumlah	1.898 Orang
--------	-------------

Sumber : Dokumentasi arsip Kelurahan Korpri Jaya (2022).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi masyarakat Perumahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung memiliki jenis usaha yang beragam. Sebagian besar di dominasi oleh petani, yang kedua yaitu pegawai negeri sipil, pedagang dan karyawan swasta. Status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, dengan melihat bahwa ada hubungan atau pengaruh ketika tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut dan sebaliknya juga ketika status sosial ekonomi seseorang rendah akan berpengaruh terhadap partisipasi politiknya dalam sebuah kegiatan politik seperti rendahnya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan legislatif.

4.1.3 Kondisi Sosial Keagamaan Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang sosial maupun keagamaan, hal ini disebabkan karena dengan adanya lembaga sosial ataupun lembaga keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.

1. Adat Istiadat

Adat istiadat penduduk di Kelurahan Korpri Jaya adalah berasal dari suku-suku yang ada di daerah tersebut seperti suku Jawa, Lampung, Sunda, maupun Banten dan suku-suku lainnya. Hal ini justru sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat Kelurahan Korpri Jaya khususnya dalam mengisi pembangunan,

meskipun diantara mereka mempunyai banyak perbedaan suku (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kelurahan Korpri Jaya adalah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk menunjang pendidikan masyarakat Kelurahan Korpri Jaya memiliki sarana pendidikan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| a. PAUD/Taman Kanak-Kanak | = 1 Buah |
| b. Sekolah Dasar/Ibtidaiyah | = 1 Buah |
| c. Sekolah Menengah Pertama/MTs | = - |
| d. Sekolah Menengah Atas/MA | = 1 Buah |
| e. Perguruan Tinggi | = - |

Sarana pendidikan yang ada inilah yang menunjang aktifitas-aktifitas pendidikan penduduk di Kelurahan Korpri Jaya (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

3. Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat serta untuk menunjang aktifitas-aktifitasnya, maka di Kelurahan Korpri Jaya terdapat organisasi kemasyarakatan yang meliputi:

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Karang Taruna
- d. Pemuda Pancasila

Organisasi tersebut yang menampung adanya aspirasi-aspirasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang ada dilingkungan sekitarnya. Aktivitas gotong royong warga Kelurahan Korpri Jaya cukup aktif, dimana kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ronda tidak dilakukan oleh warga Korpri Jaya, namun dilakukan oleh petugas ronda atau hansip. Dengan cara tersebut masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya diwajibkan

membayar uang operasional petugas ronda untuk setiap bulannya, sedangkan yang tidak mampu membayar bisa membayar dengan tenaganya saja dalam membantu jalannya kegiatan ronda tersebut (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

Pemuda di Kelurahan Korpri Jaya aktif berorganisasi dalam bentuk kelompok wisma. Kelompok wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10-20 pemuda dalam satu RT. Setelah terbentuknya kelompok kemudian diangkatlah satu orang yang memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Kelompok wisma bertujuan untuk mempermudah jalannya program-program pengumpulan dana seperti 17 Agustus di Kelurahan Korpri Jaya. Saat ini kelompok wisma di Kelurahan Korpri Jaya memiliki jumlah anggota sebanyak 80 orang (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

4. Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian yang menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Pemeluk agama Islam menjadi terbanyak dengan jumlah 4.026 orang, Pemeluk agama Kristen dan Katolik dengan masing-masing jumlah 79 dan 11 orang. Pemeluk agama Hindu berjumlah 6 orang (Kelurahan Korpri Jaya, 2022).

Sebagaimana telah dikatakan bahwa di Kelurahan Korpri Jaya mayoritas beragama Islam. Untuk menunjang kualitas umat beragama, di lokasi penelitian terdapat tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah tersebut yaitu, masjid berjumlah 8 buah dan musholla 6 buah. Selain sarana ibadah diatas, kegiatan keagamaan di lokasi penelitian pun telah ada seperti di tingkat anak-anak yang dinamakan yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPA, ditingkat remaja seperti Risma, dan pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu. Untuk lebih jelasnya kegiatan keagamaan

tersebut akan diuraikan dalam tiap-tiap Lingkungan yang ada sebagai berikut:

a. Taman Pendidikan Al-Qur'an/TPA

1) Lingkungan 1

- a. RT 01 terdapat 1 TPA berada di Musholla Al-Ikhlas
- b. RT 02 terdapat 1 TPA berada di Masjid Nurul Yaqin
- c. RT 05 terdapat 1 TPA berada di Musholla Daarul Fikri
- d. RT 06 terdapat 2 TPA berada di Musholla Ar-Ridho

2) Lingkungan 2

- a. RT 02 terdapat 1 TPA yang berada di Masjid Rachmat Hidayat

b. Pengajian Remaja

Pengajian remaja ini tergabung dalam keorganisasian remaja Islam Masjid atau Risma. Adapun jumlah risma yang ada di Kelurahan Korpri Jaya hanya terdapat di lingkungan 1, dengan data sebagai berikut :

1) Lingkungan 1

- a. RT 01 terdapat 1 Risma yaitu Risma Al-Ikhlas
- b. RT 02 terdapat 1 Risma yaitu Risma Nurul Yaqin
- c. RT 03 terdapat 1 Risma yaitu Risma Ar-Ridho

b. Pengajian

1) Pengajian Bapak-bapak

Kegiatan pengajian bapak-bapak di Kelurahan Korpri Jaya di masing-masing RT sudah ada dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun

untuk pelaksanaan pengajiannya itu dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran setiap minggunya.

2) Pengajian Ibu-Ibu

Begitu juga dengan kegiatan pengajian ibu-ibu Kelurahan Korpri Jaya di masing-masing RT sudah ada dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun untuk pelaksanaan pengajian itu dilaksanakan di masjid- masjid dan musholla yang ada di lingkungan sekitarnya. Bahkan untuk setiap 2 bulan sekali diadakan pengajian gabungan dengan masjid yang lain (Kelurahan Korpri Jaya, 2021).

Melihat data-data di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial keagamaan di Kelurahan Korpri Jaya berjalan dengan cukup baik, Dalam hal keagamaan seperti pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu terbilang sudah sudah berjalan dengan cukup baik. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih sangat mempengaruhi. nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan private dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik. Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebahagian besar masyarakat (Sulhardi,2008).

4.2 Partai Keadilan Sejahtera

4.2.1 Sejarah

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PK Sejahtera merupakan partai berasaskan Islam yang pendirinya terkait dengan pertumbuhan dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002 atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. PKS didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur, yaitu menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat. PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Dalam menjalankan roda Organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai dengan Piagam Deklarasi, visi dan misi, anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), kebijakan dasar partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai PKS.

Partai Keadilan secara resmi didiriakn pada Juli 1998, Islam asas dari partai baru ini. Tercatat lebih dari 50 pendiri partai ini, diantaranya adalah Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Salim Segaf Aljufri dan Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail kemudian menjadi Presiden Partai Keadilan, sedangkan Hidayat Nur Wahid duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Kemudian Partai ini deklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa.

Dalam perkembangan selanjutnya, PK mulai melibatkan diri dalam ajang pemilihan umum untuk kali pertama pada tahun 1999. Namun capaian pada pemilu tahun 1999, tidak memungkinkan bagi keberlanjutan partai ini. Ketentuan *electoral threshold* mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Berdasarkan UU Pemilu 1999 BAB VII Pasal 39 tentang syarat keikutsertaan dalam pemilu, Partai Keadilan tidak

diperbolehkan mengikuti pemilihan umum tahun 2004, kecuali PK mau bergabung dengan partai lainnya atau mendirikan partai politik baru.

Pada tahun 2001 diadakan rapat pleno untuk mencari cara lain agar dakwah melalui politik bias terus berjalan. Rapat menghasilkan kesepakatan untuk membuat partai politik baru yang simbolnya tak jauh berbeda dengan Partai Keadilan. Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan pada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf. Akhirnya pada tanggal 20 April 2002, PKS resmi berdiri sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut *electoral threshold*.

Dengan demikian visi dan misi partai tidak bergeser dari khittah PK dan walaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata. Atas dasar kesamaan visi dan misi tersebut, musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke-XIII yang berlangsung di wisma haji, Bekasi pada 17 April 2003 memustuskan Partai Keadilan menggabungkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Lalu pada bulan September tahun 1998 Partai Keadilan mendeklarasikan Partai Keadilan Lampung dengan deklarator dan para pendiri yang terlibat : Ir. Abdul Hakim, Drs. Gufron Azis Fuadi, Ir. Hantoni Hasan, Hilmudin Tsulani, Lc., Ir. Johan Sulaiman, dan Ir. Ahmad Junaidi Auly. Untuk kepengurusan sendiri terbentuk pada tanggal 20 September 1998. Tidak lama kemudian dibentuklah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 7 kabupaten atau kota di Lampung. Konsekuensi dari perolehan suara Partai Keadilan secara nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang hanya 1,8 persen, Partai Keadilan tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 2004.

Undang-Undang sendiri mengatur bahwa partai yang boleh mengikuti Pemilu 2004 adalah yang perolehan suaranya lebih dari 2 persen atau partai-partai baru. Oleh karena itu, untuk bisa kembali “bertarung”,

Partai Keadilan menggabungkan dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Deklarasi secara nasional di Jakarta dilakukan pada Bulan Juli 2002. Sedangkan penggabungan PK dengan PKS Lampung sebagai konsekuensi penggabungan di tingkat pusat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003.

4.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dalam pasal 2 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera secara tegas menyatakan Islam sebagai asanya. Sedangkan mengenai visi, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai visi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu visi umum dan visi khusus. Visi umum Partai Keadilan Sejahtera adalah :

“ Sebagai Partai Dakwah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Umat Dan Bangsa”.

Sedangkan visi khususnya adalah :

“ Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani”.

Visi ini akan mengarah Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan system Islam yang *rahmatan lil'alam*.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

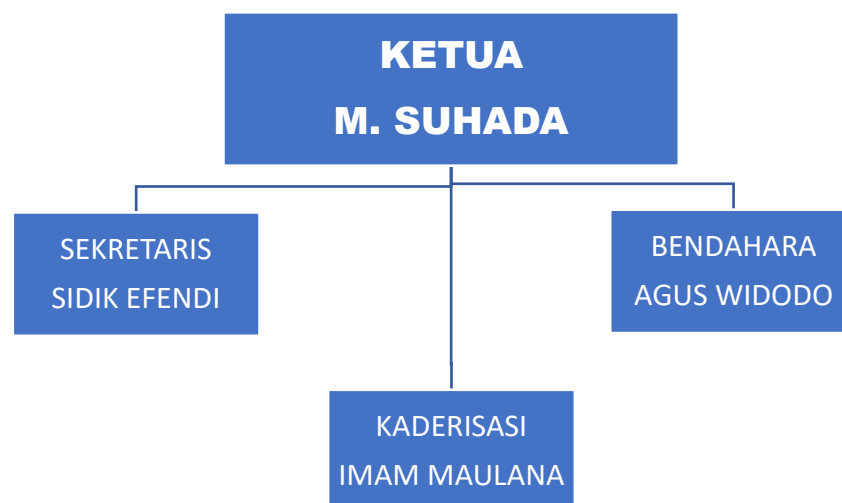
Adapun misi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu :

1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai pembawa perubahan.
2. Mengembangkan institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pembedayaan hak-hak kewarganegaraan.

4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Badan Pengurus Harian DPD PKS Kota Bandar Lampung berlaku untuk masa jabatan 2020-2025.

Gambar 2 Struktur PKS Kota Bandar Lampung



4.3 Partai Persatuan Pembangunan

4.3.1 Sejarah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.” PPP didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah :

- a. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama.
- b. H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII.
- d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti.
- e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambang Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Mukhtamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu

dilakukan melalui Mukhtamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Anggaran Rumah Tangga Lambang PPP adalah gambar Ka’bah yang berarti pemersatu umat Islam. Ka’bah bagi PPP adalah symbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan. Lambang PPP adalah gambar Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 sama sisi berwarna kuning emas.

4.3.2 Visi dan Misi

Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta keadilan social berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Platform ekonomi PPP mempertegaskan terwujudnya demokrasi ekonomi yang berpihak pada konsep dan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada keadilan ekonomi. Oleh karena itu politik-ekonomi harus

menghindari liberalisasi ekonomi, dengan demikian diperlukan mengatur regulasi perekonomian nasional.

Perekonomian nasional yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UUD 1945, seharusnya prioritas Negara menyediakan infrastruktur yang memadai, penguasaan Negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, serta memaksimalkan peran visi PPP di bidang agama. Platform PPP menegaskan tentang :

- a. Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar
- b. Pentingnya peran agama Islam sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan.
- c. Paradigma hubungan antara Islam dan Negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara yang berpegangan pada prinsip harmonis antara Universitas Islam dan lokalitas keIndonesian.
- d. Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi serta pluralisme pemikiran keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.

Misi Partai Persatuan Pembangunan meliputi :

1. PPP berkhidmat untuk berjuang mewujudkan dan membina manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

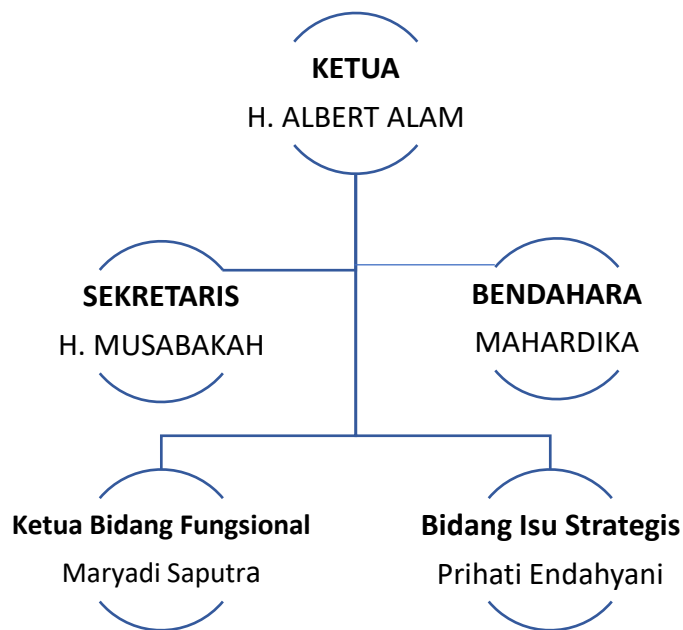
dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

4.3.3 Struktur Organisasi

Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2021-2026 :

Gambar 3 Stuktur PPP Kota Bandar Lampung



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam terjadi dalam meliputi *cost-reward-profit*. Bagi partai politik Islam mengeluarkan *cost* (pengorbanan) dalam bentuk visi misi yang disalurkan ke dalam program dan kegiatan. Pada masyarakat Islam mengeluarkan *cost* (pengorbanan) dalam bentuk mengikuti program dan kegiatan serta memberikan dukungan suara dalam kontestasi pemilu. Dengan begitu partai politik Islam mengharapkan *reward* (imbalan) dukungan suara politik dari masyarakat Islam dalam kontestasi pemilu. Pada masyarakat Islam mendapatkan *reward* (imbalan) dalam bentuk manfaat program dan kegiatan yang diberikan partai politik Islam. Sehingga pertukaran sosial memberikan keuntungan *profit* (keuntungan) antara masyarakat Islam dan partai politik Islam. Partai politik Islam mendapatkan *profit* (keuntungan) dalam bentuk kekuasaan politik dan masyarakat akan mendapatkan wadah aspirasi guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Bentuk pertukaran sosial antara masyarakat Islam dan partai politik Islam, secara spesifik dari partai politik Islam berorientasikan kepada (1) kekuasaan, yaitu keinginan mendapatkan kekuasaan dengan mekanisme kepartaian secara legal dan formal. Randall Collins menyatakan bahwa ada tiga cara individu atau kelompok mengaplikasikan kekuasaan yaitu dengan uang, paksaan, dan membangun solidaritas (Susilo, 2008). Dalam hal ini, partai politik Islam PKS dan PPP berupaya membangun solidaritas terhadap masyarakat melalui program dan kegiatan yang mereka lakukan. Dan (2) latar belakang ideologi yang diperjuangkan dalam memperebutkan kekuasaan. Dalam hal ini partai politik Islam memperjuangkan ideologi

Islam sebagai salah satu upaya mencapai kepentingannya kepada masyarakat.

Dari masyarakat Islam memiliki latar belakang kepentingan (1) Ekonomi, ekonomi adalah alasan utama infrastruktur untuk bisa di implementasikan. Oleh sebab itu, masyarakat sangat rasional jika dihadapkan pada politik transaksional. (2) latar belakang historis, latar belakang historis adalah sebab terjadinya kenyamanan psikologis sosial, masyarakat akan lebih mudah melakukan pertukaran sosial jika partai politik memiliki kedekatan dengan masyarakat. (3) Ideologi sebagai latar belakang masyarakat untuk melakukan pertukaran sosial, masyarakat mempertimbangkan apa dan bagaimana suatu ideologi partai politik. Jika masyarakat merasa nyaman dengan ideologi partai politik tersebut, maka masyarakat akan bersimpati, tetapi jika masyarakat tidak nyaman dengan ideology partai tersebut maka masyarakat akan menghindari.

Faktor pendorong pertukaran sosial bagi partai politik Islam dipengaruhi oleh bagaimana program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat Islam. Sebagaimana yang menjadi faktor kepentingan masyarakat Islam dalam pertukaran sosial yakni latar belakang historis, yang membentuk psikologis sosial masyarakat Islam agar memiliki kedekatan dengan partai politik Islam. Jika faktor kepentingan masyarakat Islam diutamakan oleh partai politik Islam yaitu masyarakat Islam merasakan kenyamanan dan mendapatkan apa yang masyarakat Islam inginkan, maka partai politik Islam akan mudah untuk melakukan pertukaran sosial kepada masyarakat Islam sehingga meraih kekuasaan. Faktor pendorong pertukaran sosial bagi masyarakat Islam dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan edukasi. Masyarakat Islam membutuhkan kesejahteraan ekonomi yang diaspirasikan melalui partai politik Islam dan membutuhkan program dan kegiatan yang mengedukasi masyarakat guna membentuk pembangunan terhadap kemajuan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang pertukaran sosial antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam di Kelurahan Korpri Jaya, peneliti mendapatkan data bahwa terdapat perbedaan pertukaran sosial yang dilakukan oleh partai politik Islam PKS dan PPP di Kelurahan Korpri Jaya.. Partai politik PKS memiliki program dan kegiatan di Kelurahan Korpri Jaya. Sedangkan partai politik PPP tidak memiliki program dan kegiatan di Kelurahan Korpri Jaya, sehingga partai PPP dan PKS mendapat *reward* (imbalan) dan *profit* (keuntungan) yang berbeda. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kekalahan partai politik Islam dapat diakibatkan karena tidak maksimalnya pertukaran sosial yang dilakukan partai politik Islam terhadap masyarakat Islam. Ketidakmampuan partai politik Islam dalam memberikan *cost* (pengorbanan) yang diperlukan masyarakat Islam menyebabkan partai politik Islam tidak akan mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilu (*reward*) dan akan kehilangan elektabilitas dan kekuasaan politik (*profit*).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Islam

Masyarakat Islam perlu meningkatkan dalam menanamkan kesadaran dan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Islam perlu memahami, membuka diri dan melihat aksi nyata yang dilakukan oleh partai politik Islam. Menciptakan kontrak politik yang baik guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara perlu kontribusi yang kuat dari masyarakat Islam, bersinergi bersama antara masyarakat Islam dengan partai politik Islam menjadi acuan dalam menghindari kontrak politik yang tidak baik. Meningkatkan partisipasi politik melalui penyampaian aspirasi guna mencapai kepentingan bersama.

2. Partai Politik Islam

Partai politik Islam perlu meningkatkan kesungguhan mereka sebagai wadah aspirasi masyarakat terkhusus mewujudkan aspirasi masyarakat Islam dalam menyuarkan aspirasi nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik Islam perlu meminimalisir aspirasi masyarakat Islam yang tidak terwujud, agar partai politik Islam dapat menjaga dan memperjuangkan eksistensi Islam dalam dunia politik di Indonesia.

3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap dapat mengembangkan dan memperluas terkait partai politik mendapatkan dukungan diluar dari basis konstituennya dan melihat apakah dukungan terhadap partai politik Islam dapat terjadi tanpa adanya pertukaran sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Efendi (ed.). Dasar Pemikiran ISTBQ, makalah pada training ISTBQ, Unpad dan Depnaker, 3 Oktober 1998
- Agustin, Dyah Satya Yoga. "Penurunan Rasa Cinta Budaya dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi." *Jurnal Sosial Humaniora* 4 (2011).
- Anderson, B. R. G. "Old state, new society: Indonesia's new order in comparative historical perspective." *The Journal of Asian Studies*, 1983: 477-496.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. 1983.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Asgari, M. "Influencing the Sociology of Defense in IR of Iran." *Defence Studies*, 2020: 93-124.
- Aziz, A. (2006). *Politik Islam Politik: Pergaulan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Baharudin Fathoni, Leo Agung, Hieronymus Purwanta. *Digital History Book As An Alternative And Solution In Teaching Heroic Exemplary Values To Improve Students Attitude Of Nationalism In Digital Era*. 2021.
- Banten, Kesatuan Badan Bangsa dan Politik Provinsi. "Wawasan kebhangaan (4 Kosensus Dasar Berbangsa dan Bernegara)." 2019.
- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiharjo Miriam, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik* hal 405-409
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, planning, conduting, and evaluating qualitative dan quantitative approaches*. London: Sage Publications.
- Creswell, a. J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications
- David L Shill (ed.), *Internasional Encyclopedia of the Sosial Science*, jilid 13-14, New York: Macmillan, 1972
- Duverger, M. (1985). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali

- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. *Journal of Applied Psychology*, Vol 71, No 3, 500-507.
- E. Rochmah, Erna Labudasari. *Augmented Reality with National Insight Media in Social Studies*. Semantic Scholar, 2020.
- Ela Nurlaela, Oktori Kiswanti Z, Sri Pudjawati. "Analisis Penggunaan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Konsumen pada Pengguna Media Sosial Instagram di Lingkungan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Manajemen*, 2019 .
- Feldman, Edmund Burke. 1987. *Varieties Of Visual Experience*. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J..
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice In Europe and America*. Waltham, Mass. Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Irfan Maulana, Jovana Merseyside, Ossya Salsabila. "Pengaruh Social Media Influencer terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital." *Majalah Ilmiah Bijak*, 2020: 28-34.
- Iriyanto Widisuseno, Sri Sudarsih. "Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga Kotamadia Salatiga." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3* (2019): 24-28.
- Jalaluddin Rachmat. *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 1997
- Johan Setiawan, Aman Aman, Taat Wulandari. "Understanding Indonesian history, interest in learning history and national insight with nationalism attitude." *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 2020.
- Johan Setiawan, Aman, Taat Wulandari. "2020." *Understanding Indonesian history, interest in learning history*, 2020: 101-110.
- Kurniawan, Saputra Tri. *Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Mircea Eliade (editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, vol. 7, New York: McMillan 1968.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2007.

- Pertiwi, Aziska Indah. "Representasi Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basal (Kajian Interpretasi Simbolik Clifford Geertz)." 2019.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press
- Rodney Stark, Sociology, California: Wadswort Publishing Company, 1985
- Salsabila. (2022, April 5). Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data. Dipetik Oktober 14, 2022, dari dqlab.id: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primerdalam-analisis-data>
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Soltau, Roger F. (1961) An Introduction to Politics. London: Longmans, _____ Green & Co.
- Sapto Waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadilan Sejahtera di Masa transisi), (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), h. 31
- Surbakri, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1984.
- Susilo, R. K. (2008). 20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Thomas Meyer. 2012. *Constraint Party Policy Change*. London: ECPR Press.
- Widodo, Suwarno. "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme." 2011.
- Yahyah Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 64
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik